

TESIS

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN
MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



TRY SARMEDI SARAGIH

No. Mhs : 155202387/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : TRY SARMEDI SARAGIH
Nomor Mahasiswa : 155202387/PS/MIH
Konsentrasi : LITIGASI
**Judul Tesis : KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

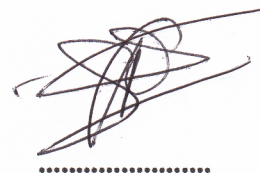
Dr. G. Widiarthana, S.H., M.Hum.

11 / 1 2017
.....

.....


Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

10-1-2017
.....

.....




UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : TRY SARMEDI SARAGIH
Nomor Mahasiswa : 155202387/PS/MIH
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : **KEWENANGAN PENYIDIK DALAM
MEMANGGIL ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 17
Januari 2017

Dewan Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. G. Widiarthana, S.H., M.Hum.

(Ketua)

23/1
.....

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

(Anggota)

23-01-2017
.....

Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum

(Anggota)

23-01-2017
.....

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Try Sarmedi Saragih

No. Mhs : 155202387

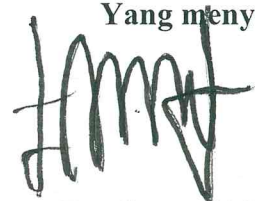
Alamat : Jl. Seturan, Acasia C8, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

Tesis dengan judul **“Kewenangan Penyidik Dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana”** merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan plagiasi dan sama sekali belum pernah diajukan maupun disahkan untuk memperoleh gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lain. Tesis ini merupakan hasil gagasan, pemikiran, analisis, hasil penelitian penulis sendiri. Keseluruhan materi maupun informasi yang tercantum dalam Tesis ini berasal dari ide dan pemikiran dari penulis lain yang telah memiliki hak atas hasil karya tulisnya dengan menyebut nama pengarang, tahun terbit, judul buku, penerbit dan bahan-bahan materi lain yang mendukung penulisan Tesis ini sudah dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Yang menyatakan



Try Sarmedi Saragih

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Kewenangan Penyidik dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut : pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden dan pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden bertentangan dengan asas *equality before the law*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi perlunya izin Presiden terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana; mengkaji, menganalisis kesesuaian antara perlunya izin Presiden terkait pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan asas *equality before the law*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan perbandingan hukum, serta mengkaji dari perspektif teori negara hukum, teori perijinan dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak khusus yang dijamin undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang ketika dilakukan proses penyidikan. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang oleh penyidik kepolisian akan memengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin Presiden akan mengganggu dan menghambat kinerja penyidik kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum. 2) Terhambatnya proses penyidikan dalam penegakan hukum tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*, bahwa negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum. Proses peradilan seharusnya sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Izin Presiden untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan asas *equality before the law* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan.

Kata Kunci : Penyidik Kepolisian, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The thesis titled authority of the investigator to call and check member of parliament suspected committing a crime focused to issues as follows : calling and investigation by police investigators againsts member of parliament suspected committing a crime need permission from the President and calling and investigation by police investigator againsts member of parliament suspected committing offenses must be permission from the President contrary to the principle of equality before the law. This study aims to determine to permit the President's argument relating to the calling and investigation member of parliament suspected committing a crime; assess and analyze the fit between the need to permit the President linked to call and investigation by police investigators to member of parliament suspected of committing offenses be based to the principle of equality before the law. This research is a normative legal research approach legal philosophy and approach to comparative law, assess from the perspective of state theory of law, licensing theory and the theory of legal certainty. The result of that conclusion: (1) interrogation member of parliament suspected committing a crime need permission from the President by Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Privilege guaranteed by based on law to maintain value and dignity member of parliament not to be treated reckless and arbitrary when do the investigation process. Process to call and investigation long enough by police investigators will affect result of the investigation. President's approval would interfere and performance hamper of police investigators to make the process of law enforcement. 2) process investigation hampered in law enforcement not accordance with due process of law, the state law uphold the rule of law. the judicial process should accordance with principle is fast, simple and cost-lightweight. President approval to conduct investigation to member of parliament be opposite principle of equality before the law and not accordance by the rule of law which is uphold equation, treatment, certainty and justice.

Keyword : Police Investigators, Investigation, Member of Parliament, Criminal Act.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terimakasih saya haturkan setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Mulia, karena berkat penyertaannya dan perlindungannya memberi saya kekuatan, ketegaran, kesabaran untuk menghadapi segala pergumulan dan suka cita dalam menjalani hidup ini. akhirnya mampu menyelesaikan Tesis dengan judul **“Kewenangan Penyidik Dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana”**. Besar dan nyata penyertaan Tuhan Yesus melingkupi kehidupan dan segala kegiatan sehari-hari yang tidak lepas dari perlindungan serta cinta kasih-Nya. Detik demi detik, titik demi titik saya mencoba merangkai kata demi kata untuk proses penulisan Tesis ini yang merupakan syarat terakhir untuk dipenuhi mencapai puncak pendidikan Pasca Sarjana. Akhirnya saya mampu melalui berbagai rintangan dan hambatan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal, sehingga boleh menyelesaikan dengan tepat waktu tahapan yang dipersiapkan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan sampai penelitian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Drs. M. Parnawa, M.B.A., Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Ibu Dr. E.

Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada kedua Pembimbing saya yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kontribusi untuk menyelesaikan Tesis ini, sehingga tercapai hasil kerjasama yang baik untuk mendapat Tesis yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua Pembimbing yang sudah sabar untuk mentransfer ilmunya agar Tesis ini dapat selesai tepat waktu dan mempunyai ciri khas sendiri serta berbeda dengan Tesis-tesis yang lain;
3. Bapak Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji Tesis ini mulai dari Seminar Proposal Tesis sampai pada Sidang Tesis. Terimakasih saya haturkan sudah memberikan masukan, catatan, kritikan yang membangun, sehingga Tesis ini dapat menjadi tulisan yang berkualitas. Melalui kritik dan masukan penguji, maka Tesis ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan substansi Tesis ini;
4. Kepada Dosen Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah sabar membagikan dan mentransfer ilmunya pada saya dalam perkuliahan; segenap Civitas maupun Staf pengelola Pasca Sarjana beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

5. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Bapak AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H., selaku Kasubdit II Harda POLDA DIY; Bapak Hifdzil Alim, S.H., M.H., selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM); yang telah membagikan ilmunya dalam proses penelitian Tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terlepas dari kebaikan Narasumber untuk mendukung hasil penelitian Tesis ini;
6. Bapa-ku Alm. Jhon Willem Saragih dan Mama-ku Santiana Purba yang berjuang untuk saya dalam perkuliahan, dukungan moral, materil, memberi doa dan semangat hingga saat ini; Abang-ku Badya R.H. Saragih, Joapri S. Saragih, dan Adikku Yuli Irani Saragih yang terus menyemangati saya agar tegar dalam perkuliahan dan proses penyelesaian Tesis;
7. Keluarga Besar Pomparan Oppung Moan yang sudah mendukung proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini. Datok dan Oppung Inang, Bapa Uda dan Inanguda; Namboru dan Kela; Tulang dan Natturang. Secara khusus saya haturkan saya sampaikan kepada Namboru Pestauli Saragih (Mama Joshua) yang sudah banyak memberikan bantuan dan semangat hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan proses pendidikan Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Keluarga Besar Toga Parna dan Naposo Bulung Parna; Keluarga Besar Toga Simamora dan Naposo Simamora yang menjadi keluarga setia dalam kehidupan sehari-hari baik suka maupun duka di Yogyakarta. Berbagai kisah

dan kasih, memberikan semangat dalam perkuliahan maupun pergaulan, sehingga terjalin kekeluargaan di perantauan.

9. Rekan-rekan Advokat dan Calon Advokat Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membagikan ilmunya, berdiskusi mengenai Tesis yang sedang saya kerjakan, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmunya dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan September 2015 Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan motivasi, semangat dan berkontribusi dalam proses penyelesaian Tesis ini hingga akhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuannya, dukungan dan bantuan baik proses awal, proses penelitian dan proses akhir.

Demikian pula mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk memberikan kritik, saran yang membangun dan motifasi yang luar biasa. Harapan penulis semoga Tesis ini berkenan dihati para pembaca, dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Penulis

Try Sarmedi Saragih

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Almarhum Bapak, Jhon Willem Saragih**
- 3. Mama, Santiana Purba**
- 4. Abang dan adik, Badya Radja H., S.E., Saragih, Joapri Saputra Saragih, S.Hut., Yuli Irani Saragih**
- 5. Seluruh Keluarga Besar Popparan Oppung Moan Saragih dan Keluarga Besar Popparan Oppung Boy Purba**

MOTTO

KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN ADALAH

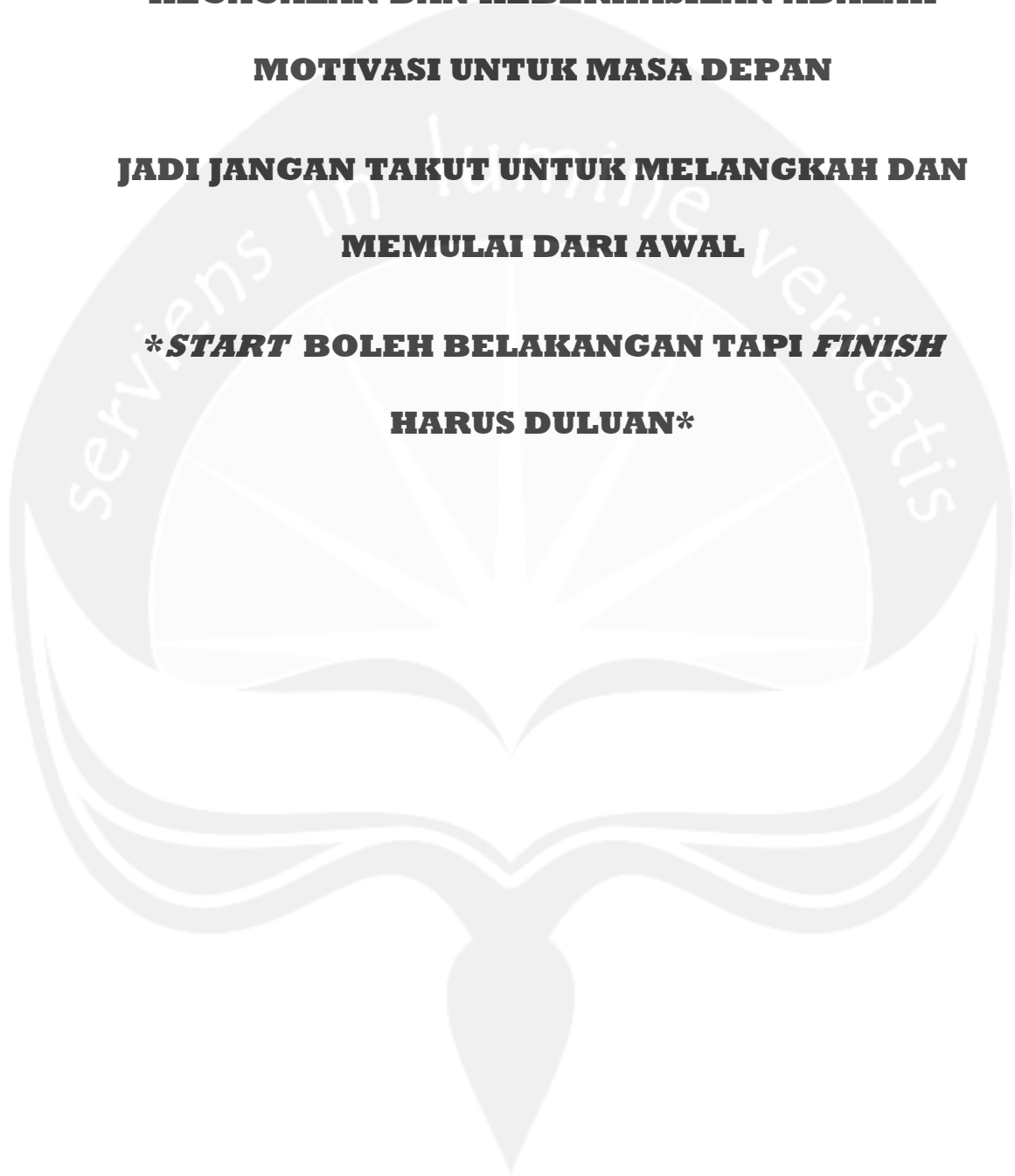
MOTIVASI UNTUK MASA DEPAN

JADI JANGAN TAKUT UNTUK MELANGKAH DAN

MEMULAI DARI AWAL

****START BOLEH BELAKANGAN TAPI FINISH***

HARUS DULUAN*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Konsep.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Keaslian Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Pidana.....	18
1. Ruang Lingkup Penyidik.....	18
2. Tugas dan Kewenangan Penyidik.....	19
B. Hak Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana.....	23
1. Hak Tersangka Dalam Penyidikan.....	23
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	28
C. Landasan Teori.....	30
1. Teori Negara Hukum.....	30
2. Teori Perizinan.....	32
3. Teori Kepastian Hukum.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
1. Pendekatan Filsafat Hukum.....	37
2. Pendekatan Perbandingan Hukum.....	38
C. Data Penelitian.....	39
1. Bahan Hukum Primer.....	39
2. Bahan Hukum Sekunder.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
1. Studi Kepustakaan.....	41
2. Wawancara.....	41
E. Metode Analisis Data.....	42

1. Bahan Hukum Primer.....	42
a. Deskripsi.....	42
b. Sistematisasi Hukum Positif.....	42
c. Analisis Hukum.....	43
d. Interpretasi Hukum.....	46
e. Menilai Hukum Positif.....	46
2. Bahan Hukum Sekunder.....	46
F. Proses Berpikir.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pemanggilan dan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.....	48
1. Pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian dalam perkara pidana.....	48
2. Prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.....	55
B. Relevansi izin Presiden dalam pemanggilan dan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.....	66
1. Relevansi izin Presiden dalam penyidikan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.....	66
2. Keterkaitan izin Presiden dengan asas <i>equality before the law</i>	87

BAB V PENUTUP.....	116
---------------------------	------------

A. Kesimpulan.....	116
---------------------------	------------

B. Saran.....	117
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....	119
----------------------------	------------

LAMPIRAN	
-----------------	--

